

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN

2024

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap berakhirnya tahun anggaran diwajibkan setiap SKPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Indikator Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pemimpin SKPD kepada atasannya, untuk mengetahui akuntabilitas instansi baik dari segi kinerja maupun keuangan dan merupakan laporan pertanggungjawaban SKPD terhadap tugas – tugas yang diembankan kepadanya. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mungkin masih terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga laporan ini akan menjadi sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mallii, 15 Januari 2025
KEPALA DINAS,

A.P. SAGIN, S.Sos, MM
NIP. 196511051987031015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi	Hal 1
2. Bidang Kewenangan	Hal 2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	Hal 2
4. Struktur Organisasi	Hal 3

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi	Hal 7
2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembngunan.....	Hal 8
3. Rencana Kinerja PD	Hal 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja	Hal 15
2. Realisasi Anggaran	Hal 51

BAB IV Penutup.....	Hal 87
----------------------------	---------------

LAMPIRAN

1. Gambaran Umum Instansi

Proses penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pelaksanaan pemerintah dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, laporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas ini juga merupakan implementasi dari salah satu core **Values ASN BerAKHLAK** yaitu Akuntabel dimana Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya.

Aspek – Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan stratejik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

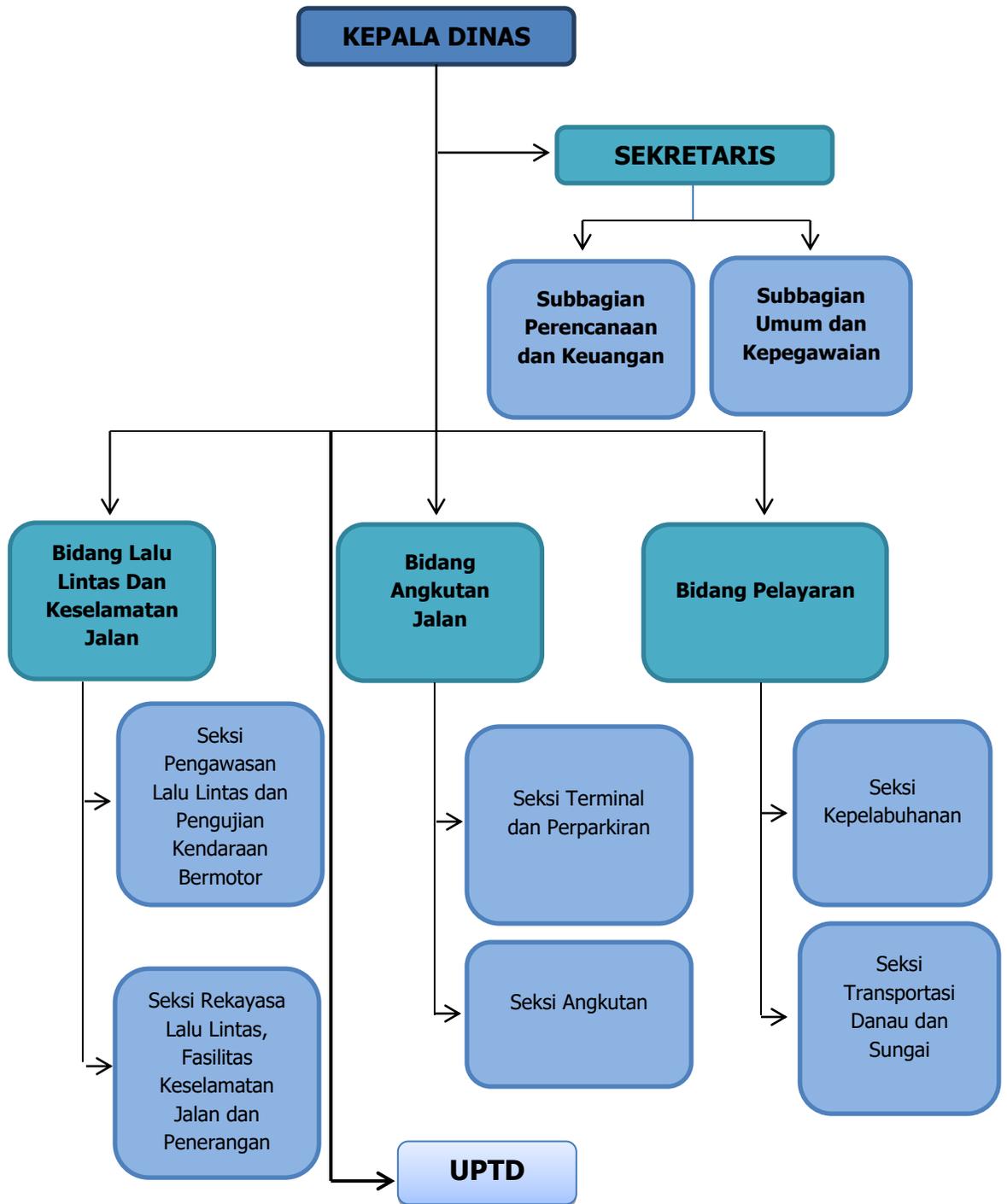
- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya..

4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan
Penerangan Jalan Umum.
4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
Seksi Terminal dan Perparkiran;
Seksi Angkutan.
5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
Seksi Kepelabuhanan; dan
Seksi Transportasi Danau dan Sungai.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

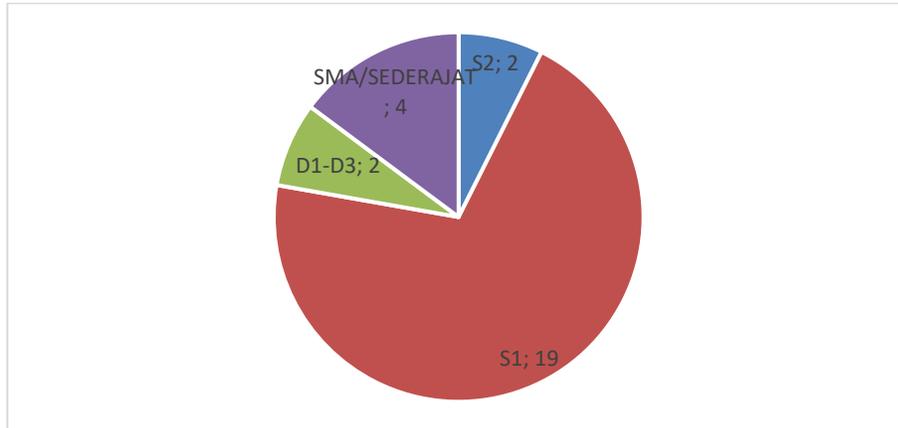
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan susunan organisasi diatas, Dinas Perhubungan memiliki pegawai berjumlah 84 orang, terdiri dari 27 PNS dan 63 upah jasa. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, golongan dan jabatan dapat lihat pada table sebagai berikut :

Gambar 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

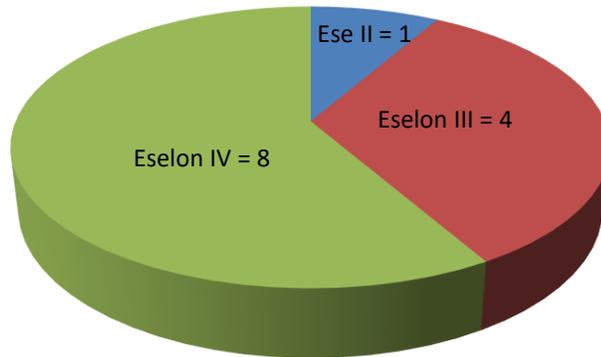


Tabel 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Pembina Tk. 1, IV/b	
3	Pembina, IV/a	3
4	Penata Tk.I, III/d	6
5	Penata, III/c	5
6	Penata Muda Tk.I, III/b	4
7	Penata Muda, III/a	2
8	Pengatur, II/d	2
9	Pengatur Muda Tk.I, II/c	2
9	Pengatur Muda, II/b	1

Gambar 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Eselon



1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Perhubungan haruslah juga mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**

1.2 Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Perhubungan dinyatakan sebagai suatu tugas untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman akan misi, maka dapat diharapkan unsur dalam sistem transportasi mampu berinteraksi untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun misi Dinas Perhubungan mengacu pada 2 misi yaitu:

- Misi 3 { • Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- Misi 4 { • Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

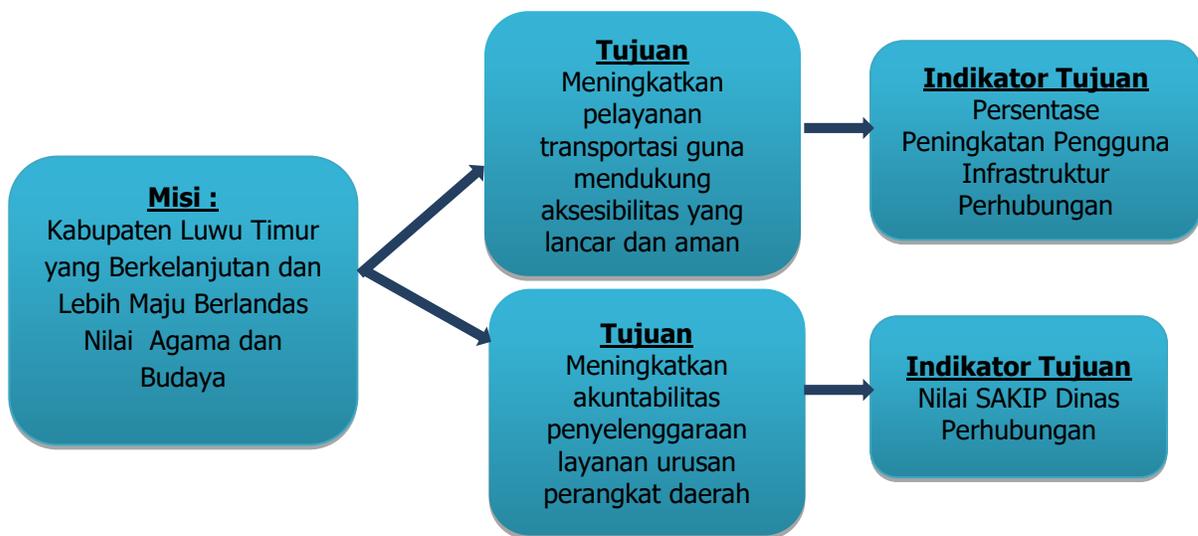
2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idialistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tujuan RENSTRA Dishub 2021 – 2026



2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaranorganisasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman								
SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi								
Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	0.30	0.58	0.63	0.67	0.72	0.77
SASARAN 2: Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi								
Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	((Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi) / (Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi)) x 100%)	%	76.35	77.87	79.35	80.76	82.03	83.32
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n / jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	0,13
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan								
SASARAN 2: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan								
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai	66,22	70,35	73,24	75,26	80,25	82,55

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan SKPD

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya				
Misi : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung aksesibilitas yang lancar dan aman	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas	
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan angkutan menuju fasilitas publik seperti sekolah, pasar dan objek wisata yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah	Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik	
	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sehingga menciptakan ketertiban dan keselamatan pengoperasian angkutan umum		Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi
				Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)
				Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat
			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT	
Misi : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)				

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target

3. RENCANA KINERJA SKPD

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok

3.1 Program

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun 2 Program Urusan Perhubungan dan 1 Program Urusan Penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Urusan Perhubungan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berdaya guna dan berhasil guna	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	(Jumlah sarana dan prasarana LLAJ yang terbangun/jumlah sarana dan prasarana LLAJ yg seharusnya ada)*80%+(Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang/jumlah rambu lalu lintas yang seharusnya ada)*20%	%	45,08%	52,46%	67,37%	79,90%	90,93%	100,00%
Terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman dan nyaman	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	Rencana Kendaraan yang lolos uji (laik jalan)/Rencana Jumlah Kendaraan wajib uji	%	94,07%	94,24%	94,41%	94,57%	94,73%	94,88%
	Persentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji (%)	(Jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji yang tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n)*100%	%	0	0	0	0,27	0,20	0,13
Program Pengelolaan Pelayaran									
Terciptanya pelayaran kapal yang aman dan nyaman	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%)	Jumlah kapal yang beralamat Kabupaten Luwu Timur yang memiliki izin layar /jumlah kapal yang berlayar yang beralamat Kabupaten Luwu Timur	%	22,17%	27,17%	31,98%	36,57%	40,86%	45,18%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)	Jumlah kapal yang beroperasi di danau yang memiliki izin/jumlah kapal yang beroperasi di danau	%	12,50%	25,00%	43,75%	68,75%	87,50%	100,00%
Program Pengelolaan Penerbangan									
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan bandara	Jumlah penumpang angkutan udara (orang)	Jumlah penumpang angkutan udara tahun-n	orang	6137	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah capaian Kinerja Kegiatan/Jumlah Kegiatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2 Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan telah menetapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini ditetapkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah kepada Kepala SKPD selaku penerima amanah. Dalam setiap perjanjian kinerja yang dibuat, telah ditetapkan indikator yang terukur. Salah satu tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja SKPD.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2024 yang dibuat Kepala Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2024	Target Perubahan 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,67	0,67
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83,81%	72,48%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,27	0,27
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	79,85	79,85

Pada Indikator Kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dilakukan perubahan target dari 83,81% menjadi 72,48%. Hal ini terjadi karena adanya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.502/78/5/DRJD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB , sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak dapat melaksanakan pengajuan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksankannya perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Dengan adanya keputusan tersebut maka dilakukan perubahan jumlah kendaraan laik jalan dari 3.135 unit menjadi 2.700 unit, karena jumlah kendaraan yang diuji sampai Agustus adalah sebanyak 2.273 unit, dengan harapan sisa target dicapai melalui numpang uji di Kabupaten lain.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang perhubungan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun berjalan. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan dan target per tahun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tren capaian tiap – tiap program setiap tahun. Sehingga akan didapatkan data program – program yang capaiannya telah mendekati target maupun yang belum mendekati target. Setiap capaian kinerja akan dilakukan analisis keberhasilan atau kegagalan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari 3 Sasaran Strategis ditetapkan 4 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten
2. Persentase angkutan umum yang laik beroperasi
3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi
4. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Tabel A
Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas
Perhubungan Tahun 2024

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,67	0,67	100,00%
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	72,48%	72,72%	100,32%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,27	0	200,00%
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	79,85	80,10	100,31%

I. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi

Indikator : Rasio Konektivitas Kabupaten

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan yang mana telah dilakukan beberapa kali penyesuaian, memiliki sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas. Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Kabupaten Luwu Timur yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Berikut merupakan formulasinya

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas kabupaten $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

- IK1 (angkutan jalan) = $\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}}$
- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = $\frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut}}$

Keterangan :

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan sungai, danau, penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antara wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

- a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot trayek lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), = 0.8
- c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut}} \\ &= \frac{8 \times 1}{15} \\ &= 0,53 \end{aligned}$$

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan Intas penyeberangan pada kabupaten}} \\ &= \frac{8 \times 1}{8} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) +
 (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau
 dan penyeberangan)

Indikator	Formula	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	
Rasio Konektivitas Wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (0,333*70%) + (1*30%)	0,67	0,67	100%	
	IK1	0,53	0,533		
	Bobot angkutan jalan	70%	70%		
	IK2	1	1		
	Bobot bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	30%	30%		
	IK1 (angkutan jalan)	Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	0,53	0,47	
		Jumlah trayek yang dilayani	8	7	
		Bobot trayek	1	1	
		Jumlah Kebutuhan trayek	15	15	
	IK 2 (Angkutan sungai, danau, penyeberangan)	jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)	1	1	
		Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi	8	8	
		bobot lintas	1	1	
Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan		8	8		

Note: Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30

(sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

$$= (0,53 \times 70\%) + (1 \times 30\%)$$

$$= 0,373 + 0,3$$

$$= 0,67$$

Rasio Konektivitas 0,67 artinya sebanyak 0,67 atau 67% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan.

Nilai terget sebesar 0,67 meningkat dari tahun sebelumnya

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2024

TRAYEK ANGKUTAN DARAT

No	Nama Trayek	Rencana Rute	Realisasi Rute	Ke t
1	Trayek 1 (AKAP)	Malili - Sulawesi Tenggara		
2	Trayek 2 (AKAP)	Malili - Sulawesi Tengah	Malili - Sulawesi Tengah	
3	Trayek 3 (AKDP)	Sorowako - Malili - Makassar	Sorowako - Malili - Makassar	
4	Trayek 4 (ANDES)	Malili - Tomoni		
5	Trayek 5 (ANDES)	Malili - Burau		
6	Trayek 6 (ANDES)	Malili - Mangkutana		
7	Trayek 7 (ANDES)	Malili - Sorowako	Malili- Wasuponda-Soroako	
8	Trayek 8 (ANDES)	Malili - Wawondula	Malili-Wasuponda-Wawondula-Timampu	
9	Trayek 9 (ANDES)	Malili - Wotu		
10	Trayek 10 (ANDES)	Malili - Wasuponda	Malili-Wasuponda-Wawondula-Timampu	
11	Trayek 11 (ANDES)	Tomoni - Kalaena		
12	Trayek 12 (ANDES)	Tomoni - Wotu		
13	Trayek 13 (ANDES)	Wasuponda - Sorowako	Wasuponda - Sorowako	
14	Trayek 14 (ANDES)	Wasuponda - Wawondula	Wasuponda - Wawondula	
15	Trayek 15 (ANDES)	Wawondula - Sorowako	Wawondula - Sorowako	

LINTAS PENYEBERANGAN

No	Nama Trayek	Rute	Ket
1	Trayek 1	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Loeha	Trayek Kapal Tradisional
2	Trayek 2	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Bantilang	Trayek Kapal Tradisional
3	Trayek 3	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Batu Mata'a (Desa Tokalimbo)	Trayek Kapal Tradisional
4	Trayek 4	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Beau (Desa Tokalimbo)	Trayek Kapal Fery & Trayek Kapal Tradisional
5	Trayek 5	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Lengkobale	Trayek Kapal Tradisional
6	Trayek 6	Pelabuhan Soroako-Pelabuhan Nuha	Trayek Kapal Fery & Trayek Kapal Tradisional
7	Trayek 7	Pelabuhan Soroako-Pelabuhan Matano	Trayek Kapal Tradisional
8	Trayek 8	Pelabuhan Matano-Pelabuhan Nuha	Trayek Kapal Tradisional

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,67	0,67	100,00%

Rasio Konektivitas Kabupaten dengan pada Tahun 2024 di target sebesar 0,67 karena terdapat penambahan 1 rute baru yaitu Malili- Sulawesi Tengah.

Rasio Konektivitas 0,67 artinya sebanyak 0,67 atau 67% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan. Semakin tinggi rasio konektivitas angkutan jalan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Capaian Kinerja Thn 2023		Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	9	6	8	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,3	0,3	100%	0,4	0,4	100%	0,67	0,67	100%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat dan realisasinya sesuai dengan target sehingga capaian kinerja setiap tahun sebesar 100%

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024(%)
		Target	Real		Target TW 4	Real	
1	2	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,4	0,4	100%	0,67	0,67	100%

Untuk capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100% yang berarti tidak ada perbedaan capaian Rasio Konektivitas Kabupaten

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2024	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,77	0,67	81,74%

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target jangka menengah Tahun 2021 -2026 adalah sebesar 87,83% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut.

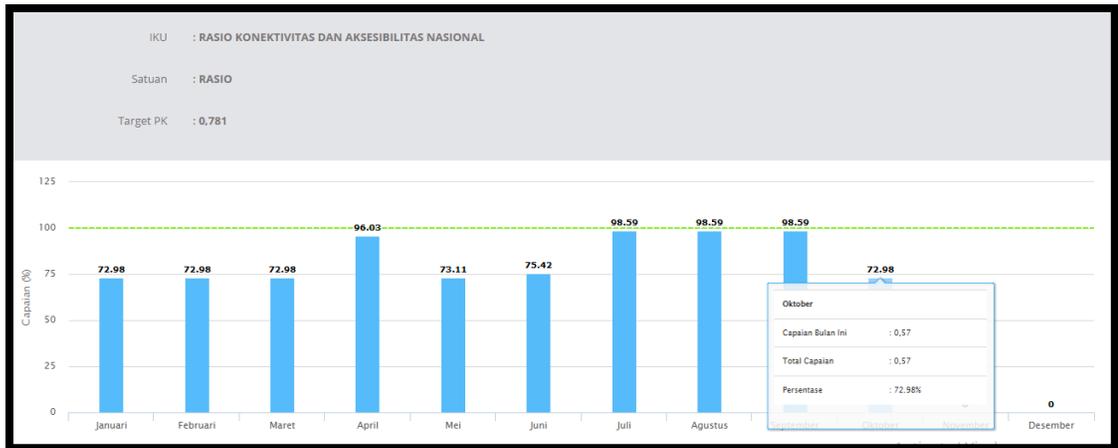
E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2024	Realisasi Target Kabupaten TW 4	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,57	0,67	117,54%

Target Rasio konektivitas Kabupaten untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,67 sedangkan untuk Rasio Konektivitas Dan Aksesibilitas Nasional sebesar 0,57 (sesuai data per tanggal 18 Februari 2024,data masih bersifat sementara karena data bulan November dan Desember belum rilis) dimana capaian Kab. Luwu Timur sebesar 87,83 %



Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.7
Realisasi Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	Rasio konektivitas Kabupaten	100%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

- Pembangunan Terminal
 Dengan terbangunnya Terminal Malili dan Terminal Tarengge maka diharapkan Segala aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal.
- Pengoperasian dan pemeliharaan Bus Sekolah
 Dengan adanya 28 unit bus sekolah yang melayani 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur maka akses anak sekolah untuk pergi dan pulang sekolah lebih mudah dan aman.

- Rekomendasi izin trayek
Dengan adanya rekomendasi izin trayek maka angkutan umum dapat mengurus pembuatan atau perpanjangan izin trayek sehingga semua angkutan umum penumpang yang beroperasi di Kabupaten Luwu timur memiliki trayek tetap
 - Pengawasan terhadap trayek yang dilayani
Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan, serta untuk mengetahui faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan sehingga dapat diambil langkah – langkah pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Dengan beroperasi dan terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau maka akses pengguna fasilitas pelabuhan akan lebih mudah dan aman
 - Penetapan Trayek Penyeberangan
2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*
Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :
- Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga aktivitas yang dilaksanakan di Terminal tersebut belum maksimal
 - angkutan umum yang tidak memperpanjang maupun mengurus izin trayek, dimana hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas karena syarat angkutan umum dapat beroperasi adalah berbadan hukum atau badan usaha.
 - maraknya kendaraan plat gantung beroperasi lainnya kendaraan umum yang sah
3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*
Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :
- Berkolaborasi dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayeknya, untuk bersama-sama mengatur kelangsungan pengusaha angkutan umum agar tercipta pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
 - Memberikan teguran langsung kepada pemilik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek namun melakukan aktivitas layaknya angkutan penumpang umum, sehingga hal ini merugikan angkutan penumpang umum lainnya, karena akan mempengaruhi jumlah penumpang yang diangkut serta pendapatan pemilik kendaraan.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1.841.500.000	1.841.500.000	1.220.621.800	66,28%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	795.580.000	795.580.000	577.232.487	72,55%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	31.774.900	31.774.900	18.985.940	59,75%
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	4.328.100.000	4.328.100.000	4.281.809.390	98,93%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	82.321.750	82.321.750	80.171.539	97,39%
6	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	67.500.000	67.500.000	67.263.840	99,65%
7	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	443.478.850	443.478.850	418.746.747	94,42%
TOTAL		7.590.255.500,00	7.590.255.500,00	6.664.831.743,24	87,81%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1 beberapa sub kegiatan dengan realisasi keuangan belum maksimal yaitu :

- a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Realisasi sebesar 66,28% atau sebesar Rp.1.220.621.800,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 620.878.200

yang terdiri dari Belanja Pemasangan PJU Terminal Malili dan Tarengge sebesar Rp. 227.250.000 tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan terdapat pembayaran termin III Pembangunan Terminal Malili yang tidak terbayarkan karena perjaannya menyeberang selama 20 hari

- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Realisasi sebesar 73,39% sisa anggaran sebesar Rp. 221.665.65,- terdiri dari pembayaran uang muka Rehab Papan Nama yang belum tercatat karena Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pos Jaga belum keluar, namun untuk pembangunan dan kelengkapan SPJ pencairan telah disusun dan masukkan ke BKAD. Kemudian sisa pembayaran kontrak untuk Rehab Papan Nama tersebut menyeberang ke Tahun 2025 karena diberikan perpanjangan waktu kontrak selama 23 hari kalender
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.755.940 atau 59,75% dari anggaran Rp.31.774.900, anggaran yang tersisa adalah anggaran perjalanan dinas

H. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan melalui Pemeliharaan Terminal yang ada dan Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge, Dengan terbangunnya beberapa fasilitas utama di Terminal Malili dan Tarengge maka diharapkan aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas menaik dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal. Sehingga jumlah orang atau masyarakat yang menggunakan fasilitas Terminal semakin meningkat setiap tahunnya.

Gambar 3.1
Pembangunan
Terminal Malili
Tahun 2024



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan dan pengelolaan tempat Parkir untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan untuk mengurangi parkir liar.

- c. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya, selama tahun 2024 sebanyak 391.820 yang terdiri dari 391.600 siswa dan siswi SMP dan SMA Kabupaten Luwu Timur diangkut oleh Bus Sekolah setiap hari dan 420 orang masyarakat Kab. Luwu Timur yang difasilitasi aktivitas mudik dan baliknya saat Hari raya Idul Fitri. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan sekolah maka dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 28 unit bus sekolah melalui Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan juga diadakan penambahan 2 unit angkutan bus.

- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengupayakan tersedianya pelayanan jasa angkutan orang dengan penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak terjadwal berupa trayek.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengurusan izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.

Pada tahun 2024 jumlah penumpang dan barang sebanyak 117.230 yang melalui Dermaga meningkat karena pada lintasan dermaga Sorowako ke dermaga Nuha dan lintasan dermaga Timampu ke dermaga Tokalimbo dilayani kapal ferry KMP Opudi dan KMP Pangkilang yang memiliki standar keselamatan dan kelaiklautan kapal, memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang prima serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi danau Matano dan danau Towuti yang menyebabkan meningkatnya penumpang pada penyeberangan danau Matano dan danau Towuti

II. Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi

Indikator 1 : Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target tahun 2024 sebesar 100,32% dengan realisasi sebesar 72,72% dihitung sesuai dengan jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 1 :

$$\begin{aligned} &= ((\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi}) / (\text{Jumlah} \\ &\quad \text{angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi})) \times \\ &\quad 100\%) \\ &= ((3.100/4263) \times 100\%) \\ &= 72,72\% \end{aligned}$$

Indikator 1 mengukur keselamatan dan keamanan dari ketersediaan angkutan umum orang dan barang yang laik beroperasi, meningkatkan keselamatan transportasi angkutan di darat, laut dan danau. Dimana keselamatan dalam bertransportasi dapat terwujud apabila sistemnya (orang, kendaraan dan aturan) dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di kendaraan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan langkah – langkah melalui pengujian kendaraan bermotor untuk kendaraan wajib uji dan memfasilitasi pengurusan pas kapal laut dan danau sehingga kapal yang beroperasi memiliki izin operasi

Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kendaraan bermotor yang digunakan harus laik jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum

kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Agar dapat diciptakan kondisi pemenuhan terhadap persyaratan di atas, maka dilakukanlah apa yang dinamakan pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk mengecek apakah kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara periodik per-setiap 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan untuk mewujudkan lalu lintas kapal di laut dan di danau yang aman, maka dilaksanakan kegiatan peningkatan skill pengemudi kapal dan fasilitasi perijinan kapal.

Pada tahun 2024 Capaian target indikator 1 mencapai 100,32% dimana dilakukan pengujian kendaraan dan sebanyak 2.710 unit angkutan penumpang umum dan angkutan barang dianggap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, 138 unit Kapal di danau yang laik berlayar serta 252 unit kapal di laut yang laik berlayar. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor terutama pengujian kendaraan yang dilakukan secara efektif, yakni tenaga penguji yang meskipun masih kekurangan personil tetapi dapat bekerja handal dan profesional. Fasilitas dan perlengkapan pengujian yang cukup lengkap melalui pengadaan alat uji sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemeliharaan secara rutin serta Kalibrasi terhadap alat pengujian. Perbaikan prosedur dan mekanisme pengujian, serta sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang dalam fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan juga mendukung dalam pencapaian target.

Tabel 3.9
Tabel Capaian Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi

No.	Uraian	Jumlah	Target 2024		Realisasi 2024	
			Yang berizin	%	Yang berizin	%
1	Kendaraan Wajib Uji (Darat)	3160	2700	85,44%	2710	100,37%
2	Kapal di Laut	957	252	26,33%	252	100,00%

No.	Uraian	Jumlah	Target 2024		Realisasi 2024	
			Yang berizin	%	Yang berizin	%
3	Kapal di Danau	146	138	94,52%	138	100,00%
	TOTAL	4263	3090	72,48%	3100	72,72%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.10

Capaian Target Sasaran 2 Indikator 1

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1	2	3	4	6	7
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	72,48%	72,72%	100,32%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target tahun 2024 sebesar 100,32% dengan realisasi sebesar 72,72%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	19,42%	24,99%	128,68%	19,84%	23,60%	118,95%	72,48%	72,72%	100,32%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat, pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 128,68% ,pada tahun 2023 capaian sebesar 118,95% dan pada tahun 2024 capaian tahun 2024 100,32%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	19,84%	23,60%	118,95%	72,48%	72,72%	100,32%

Untuk capaian kinerja tahun 2023 sebesar 118,95% dan Tahun 2024 sebesar 100,32%, ini berarti belum ada peningkatan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2024	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83.32%	72,72%	87,275%

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 87,275% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

- **Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**
Dilakukannya perubahan target kendaraan laik jalan perubahan target dari 83,81% menjadi 72,48%. Hal ini terjadi karena adanya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.502/78/5/DRJD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB , sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak dapat melaksanakan pengajuan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksankannya perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Dengan adanya keputusan tersebut maka dilakukan perubahan jumlah kendaraan laik jalan dari 3.135 unit menjadi 2.700 unit, karena jumlah kendaraan yang diuji sampai Agustus adalah sebanyak 2.273 unit, dan sisa target dicapai melalui numpang uji di Kabupaten lain
Sebagai respon terhadap pembekuan Penetapan dan Sertifikasi Akreditasi UPUBKB maka dilakukan perbaikan melalui update Aplikasi SIM PKB.
- **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
Pemeliharaan terhadap 11 unit melalui pemeliharaan rutin dan penggantian alat pengujian suku cadang pada alat yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik dan juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan kalibrasi terhadap alat uji kendaraan bermotor untuk memastikan keakurasian alat. Alat pengujian yang akurat dapat memastikan kendaraan yang diuji KIR telah aman, nyaman dan laik jalan.

➤ **Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekaya lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.

Dimana dilakukan Pengaturan lalu lintas di jalan raya, terutama di titik-titik yang rawan kemacetan dan kecelakaan kerjasama Polisi Lalu Lintas (POLANTAS), titik Lokasi pengaturan lalu lintas Di persimpangan, Di pusat keramaian, Di ruas jalan yang rawan kemacetan, Di ruas jalan yang rawan kecelakaan.

Adapun Pengaturan Lalu Lintas yang rutin dilaksanakan adalah Operasi Patuh, Operasi Ketupat, dan Operasi Lilin.

➤ **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota**

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 13 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memberikan pelayanan dengan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan.

➤ **Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**

Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2024 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 138 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kolaborasi dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pengujian kendaraan bermotor dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap 1 unit kendaraan wajib uji. Pada tahun 2024 mulai bulan Januari sampai bulan September dilakukan terdapat 2.273 unit kendaraan yang laik jalan dan target pada anggaran pokok sebesar 3.135 unit, namun dengan adanya pembekuan pengujian kendaraan bermotor maka dilakukan perubahan target sebesar 2.700 unit.
- Kurangnya Sumber Daya manusia khususnya tenaga pengujian kendaraan bermotor, kondisi saat ini hanya terdapat 3 orang yang bersertifikat sesuai dengan jenjang masing-masing, dimana 2 orang berstatus PNS dan 1 orang upah jasa, jika dibandingkan dengan jumlah pengujian yang dilakukan setiap harinya, maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian target kinerja. sehingga diharapkan adanya penambahan personel Pengujian Kendaraan Bermotor
- Angkutan umum yang tidak tertib dalam mengurus dan memperpanjang bukti lulus uji
- Pada tahun 2024 jumlah kapal yang telah difasilitasi sebanyak 252 unit dari target 252 unit atau sebesar 100% hal ini terjadi karena adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Kantor Syahbandar sehingga tidak dapat melakukan pengukuran kapal terhadap kapal yang telah difasilitasi pengurusan ijinnya
- Pemilik kapal yang kurang aktif dan cenderung malas melakukan pengurusan surat izin berlayar

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Melakukan koordinasi ke Balai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mencari solusi agar sanksi yang diberikan Kementerian Perhubungan dapat dicabut
- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Mengajukan ke BKPSDM Kabupaten Luwu Timur untuk membuka formasi penerimaan CPNS atau PPPK untuk Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Aparatur Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.
- Agar pengurusan kelengkapan dokumen kapal dapat selesai maka Dinas Perhubungan melalui Bidang Pelayaran melakukan penjemputan langsung dokumen dokumen yang dibutuhkan ke rumah-rumah pemilik kapal dan memfasilitasi ke Syahbandar untuk dilakukan pengukuran kapal
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	167.128.000	167.128.000	144.916.950	86,71%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.000.000	29.000.000	8.000.000	27,59%
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	466.743.800	466.743.800	459.248.350	98,39%
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16.005.500	16.005.500	15.034.050	93,93%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	229.504.100	229.504.100	214.883.339	93,63%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	67.500.000	67.500.000	67.263.840	99,65%
7	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	443.478.850	443.478.850	418.746.747	94,42%
TOTAL		1.419.360.250,00	1.419.360.250,00	1.328.093.276,00	93,57%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 1 maka terlihat ada sub kegiatan yang realisasinya sangat rendah yaitu sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Realisasi sebesar 27,59% dan terdapat sisa realisasi sebesar Rp. 21.000.000 dimana anggaran yang tersisa adalah belanja pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan bermotor dan Jasa tenaga ahli perbaikan, anggaran ini sifatnya disediakan, dan sampai akhir tahun 2024 tidak ada alat pengujian yang mengalami kerusakan, sehingga anggaran tersebut tidak direalisasikan, anggaran yang terealisasi adalah anggaran kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Angkutan umum yang aman dan nyaman dan laik jalan adalah angkutan umum yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala melalui Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman sebesar 85,76%. Sampai tahun 2024 terdapat 2.710 unit kendaraan dan dinyatakan laik jalan.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekaya lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan.
- b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.
Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2024 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 138 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

Gambar 3.2
Pengawasan
Aktivitas
Kapal & Pelabuhan



Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi
Indikator 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Rasio kejadian kecelakaan transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah Perbandingan kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan dengan jumlah kecelakaan angkutan wajib uji.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 :
 = (Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n/
 jumlah kejadian angkutan wajib uji tahun n)
 = ((0/49)x100%)
 = 0

Indikator 2 mengukur keselamatan dan keamanan dari Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji. Semakin rendah Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi maka makin sedikit kendaraan wajib uji yang kecelakaan karena kendaraan tersebut tidak laik jalan.

Tabel 3.15
Tabel Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2024

No	Uraian	Januari – Desember 2024		Keterangan
		Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	
1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	0	49	
2	Jumlah Kecelakaan Faktor Kendaraan	0	0	
3	Jumlah Kecelakaan Faktor Manusia	0	49	
4	Jumlah Kecelakaan Faktor Lingkungan	0	0	
5	Jumlah Kecelakaan Faktor Jalan	0	0	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0	0	200%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target tahun 2024 sebesar 200% dengan realisasi sebesar 0 dari target 0,27. Target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah target menurun jadi semakin kecil realisasi semakin baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0	0	100%	0	0	100%	0,27	0	200%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah 100% hal ini karena indikator ini merupakan indikator baru hasil dari perbaikan setelah coaching dengan tim dari Kemenpan RI, jadi tidak ada penetapan target untuk tahun 2022-2023 namun untuk realisasi sebesar 0% atau selama tahun 2022 dan 2023 tidak ada kendaraan wajib uji yang mengalami kecelakaan yang disebabkan kendaraan tersebut tidak laik jalan tetapi karena faktor manusia atau pengemudinya serta faktor lingkungan atau cuaca.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0	0	100%	0,27	0	200%

Untuk capaian kinerja tahun 2023 capaian sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 200%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.19

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2024	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	0,13	0	200%

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 200% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis realisasi tersebut akan tetap bertahan sampai akhir renstra.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2024	Realisasi Target Kabupaten	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,26	0,000005	199,99%

Untuk target Nasional tentang Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kementerian Perhubungan menetapkan target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan, sehingga jika dibandingkan dengan target Kabupaten Luwu Timur maka perhitungannya adalah membandingkan Jumlah Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji dibagi 1.000.000 keberangkatan

Rumus Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan = Jumlah Kejadian Kecelakaan/1.000.000 keberangkatan

= 5/1.000.000

= 0,000005

Bila dilihat perbandingannya maka Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan di Kabupaten Luwu Timur lebih kecil karena dalam lingkup yang kecil.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.21

Capaian Realisasi Sasaran 2 Target 2

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	200%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah :

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin.
- Membangun Koordinasi dan Komunikasi dengan instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
Agar terjadi keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Masih ruas jalan kabupaten yang belum dipenuhi fasilitas keselamatan jalannya khususnya PJU, Rambu-rambu dan Marka Jalan
- Angkutan umum yang tidak tertib berlalu lintas
- Belum optimalnya Koordinasi dan Komunikasi stake holder terkait dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan

L. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET 2024	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.975.400.000	1.975.400.000	1.723.078.303,0	87,23%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.959.059.250	3.959.059.250	3.923.974.061	99,11%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	229.504.100	229.504.100	214.883.339	93,63%
4	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	67.500.000	67.500.000	67.263.840	99,65%
5	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	443.478.850	443.478.850	418.746.747	94,42%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 2 maka terlihat rata-rata capaian realisasi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Realisasi sebesar 88,71% dengan sisa anggaran Rp. 222.950.712 karena terdapat belanja Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

M. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi pemasangan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum warning light, traffic light dan halte bus sekolah dengan capaian 100% dimana perlengkapan jalan yang disediakan berfungsi dengan baik, uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Penerangan Jalan Umum dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan namun masih dalam tahap pemilihan penyedia
- b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin

III.Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan
Indikator : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n.

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 berdasarkan Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.23
 Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	79,85	80,10	100,31%

Realisasi SAKIP tahun 2024 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.27
 Capaian Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %
1	2	3
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	100,31%

1. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja*

Walaupun belum ada penilaian nilai SAKIP Dinas Perhubungan namun tetap diambil langkah – langkah untuk mencapai peningkatan nilai SAKIP sebagai berikut:

- Adanya peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur Dinas Perhubungan melalui Bimtek baik yang dilakukan BKPSDM maupun yang dilakukan pihak lain.
- Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan
- Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik
- Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bapelitbangda, Bagian Organisasi)

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*

Penyebab kegagalan capaian indikator sasaran 3 yaitu :

- Untuk realisasi tahun 2024 akan menyesuaikan dengan hasil rekomendasi hasil penilaian SAKIP Tahun 2023

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 3 dengan yaitu :

- Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel 3.28

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 September 2024	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.524.650	30.040.955	98,42%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.832.150	3.633.167	94,81%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.015.750	3.508.215	87,36%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.808.150	51.235.099	75,56%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.346.187.439	3.303.542.467	98,73%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.068.800	68.800.484	94,16%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.651.100	19.515.558	99,31%
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.522.800	10.215.024	97,08%
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.523.050	16.127.979	97,61%
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.520.000	45.906.220	60,79%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.543.000	5.542.000	99,98%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.935.700	3.496.500	70,84%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.783.350	50.764.954	99,96%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.779.850	16.861.703	94,84%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 September 2024	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000	9.320.000	99,57%
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.450.000	10.283.000	98,40%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.242.400	525.767.315	94,35%
18	Pengadaan Mebel	28.400.000	27.640.000	97,32%
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.250.000	128.670.000	93,07%
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	190.565.767,86	95,28%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.150.000	21.096.020	91,13%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.564.025	68.465.122	95,67%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000	52.800.000	100,00%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000	23.941.050	99,75%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.950.000	234.981.860	99,59%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	12.820.000	81,86%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.992.500	99,96%
	TOTAL	5.113.522.214	4.955.532.960	97%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3 indikator 1 maka terlihat ada satu sub kegiatan yang realisasinya tidak maksimal yaitu sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Realisasi anggaran sebesar 60,79% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 29.613.780 yang merupakan Belanja Pelatihan atau kontribusi Bimtek dan perjalanan dinas yang dipersiapkan untuk mengikuti bimtek, Namun tidak terealisasi karena tidak ada undangan Bimtek

D. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yaitu dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada.

A. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Perhubungan	19.546.618.364	18.109.499.756	92,65%	1.437.118.608	7,35%	1.437.118.608	7,35%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.113.522.214	4.955.532.960	96,91%	157.989.254	3,09%	157.989.254	3,09%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.180.700	88.417.436	83,27%	17.763.264	16,73%	17.763.264	16,73%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.524.650	30.040.955	98,42%	483.695	1,58%	483.695	1,58%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.832.150	3.633.167	94,81%	198.983	5,19%	198.983	5,19%	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.015.750	3.508.215	87,36%	507.535	12,64%	507.535	12,64%	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.808.150	51.235.099	75,56%	16.573.051	24,44%	16.573.051	24,44%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.419.256.239	3.372.342.951	98,63%	46.913.288	1,37%	46.913.288	1,37%	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.346.187.439	3.303.542.467	98,73%	42.644.972	1,27%	42.644.972	1,27%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.068.800	68.800.484	94,16%	4.268.316	5,84%	4.268.316	5,84%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.651.100	19.515.558	99,31%	135.542	0,69%	135.542	0,69%	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.651.100	19.515.558	99,31%	135.542	0,69%	135.542	0,69%	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.522.800	10.215.024	97,08%	307.776	2,92%	307.776	2,92%	
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.522.800	10.215.024	97,08%	307.776	2,92%	307.776	2,92%	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.043.050	62.034.199	67,40%	30.008.851	32,60%	30.008.851	32,60%	
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.523.050	16.127.979	97,61%	395.071	2,39%	395.071	2,39%	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.520.000	45.906.220	60,79%	29.613.780	39,21%	29.613.780	39,21%	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	656.094.300	622.035.472	94,81%	34.058.828	5,19%	34.058.828	5,19%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.543.000	5.542.000	99,98%	1.000	0,02%	1.000	0,02%	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.935.700	3.496.500	70,84%	1.439.200	29,16%	1.439.200	29,16%	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.783.350	50.764.954	99,96%	18.396	0,04%	18.396	0,04%	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.779.850	16.861.703	94,84%	918.147	5,16%	918.147	5,16%	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000	9.320.000	99,57%	40.000	0,43%	40.000	0,43%	
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.450.000	10.283.000	98,40%	167.000	1,60%	167.000	1,60%	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.242.400	525.767.315	94,35%	31.475.085	5,65%	31.475.085	5,65%	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.650.000	346.875.768	94,61%	19.774.232	5,39%	19.774.232	5,39%	
18	Pengadaan Mebel	28.400.000	27.640.000	97,32%	760.000	2,68%	760.000	2,68%	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.250.000	128.670.000	93,07%	9.580.000	6,93%	9.580.000	6,93%	
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	190.565.767,86	95,28%	9.434.232	4,72%	9.434.232	4,72%	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.514.025	142.361.142	96,51%	5.152.883	3,49%	5.152.883	3,49%	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.150.000	21.096.020	91,13%	2.053.980	8,87%	2.053.980	8,87%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.564.025	68.465.122	95,67%	3.098.903	4,33%	3.098.903	4,33%	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000	52.800.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.610.000	291.735.410	98,69%	3.874.590	1,31%	3.874.590	1,31%	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000	23.941.050	99,75%	58.950	0,25%	58.950	0,25%	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.950.000	234.981.860	99,59%	968.140	0,41%	968.140	0,41%	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	12.820.000	81,86%	2.840.000	18,14%	2.840.000	18,14%	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.992.500	99,96%	7.500	0,04%	7.500	0,04%	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.692.613.200	12.453.072.870	90,95%	1.239.540.330	9,05%	1.239.540.330	9,05%	
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.934.459.250	5.647.052.364	95,16%	287.406.886	4,84%	287.406.886	4,84%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.975.400.000	1.723.078.303,0	87,23%	252.321.697	12,77%	252.321.697	12,77%	
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.959.059.250	3.923.974.061	99,11%	35.085.189	0,89%	35.085.189	0,89%	
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.637.080.000	1.797.854.287	68,18%	839.225.713	31,82%	839.225.713	31,82%	
30	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1.841.500.000	1.220.621.800	66,28%	620.878.200	33,72%	620.878.200	33,72%	
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	795.580.000	577.232.487	72,55%	218.347.513	27,45%	218.347.513	27,45%	
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	31.774.900	18.985.940	59,75%	12.788.960	40,25%	12.788.960	40,25%	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	31.774.900	18.985.940	59,75%	12.788.960	40,25%	12.788.960	40,25%	
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	196.128.000	152.916.950	77,97%	43.211.050	22,03%	43.211.050	22,03%	
33	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	167.128.000	144.916.950	86,71%	22.211.050	13,29%	22.211.050	13,29%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.000.000	8.000.000	27,59%	21.000.000	72,41%	21.000.000	72,41%	
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	482.749.300	474.282.400	98,25%	8.466.900	1,75%	8.466.900	1,75%	
35	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	466.743.800	459.248.350	98,39%	7.495.450	1,61%	7.495.450	1,61%	
36	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16.005.500	15.034.050	93,93%	971.450	6,07%	971.450	6,07%	
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.328.100.000	4.281.809.390	98,93%	46.290.610	1,07%	46.290.610	1,07%	
37	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	4.328.100.000	4.281.809.390	98,93%	46.290.610	1,07%	46.290.610	1,07%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.321.750	80.171.539	97,39%	2.150.211	2,61%	2.150.211	2,61%	
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	82.321.750	80.171.539	97,39%	2.150.211	2,61%	2.150.211	2,61%	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	740.482.950	700.893.926	94,65%	39.589.024	5,35%	39.589.024	5,35%	
17	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	229.504.100	214.883.339	93,63%	14.620.761	6,37%	14.620.761	6,37%	
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	229.504.100	214.883.339	93,63%	14.620.761	6,37%	14.620.761	6,37%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	510.978.850	486.010.587	95,11%	24.968.263	4,89%	24.968.263	4,89%	
40	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	67.500.000	67.263.840	99,65%	236.160	0,35%	236.160	0,35%	
41	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	443.478.850	418.746.747	94,42%	24.732.103	5,58%	24.732.103	5,58%	

No	Program						Kegiatan								Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				56 %		56 %					5%		5%					:	:			
											TW IV : 12, 5%		TW IV : 62, 5%					TW IV : :		TW IV : 2		
		Perse ntase angk utan umum yang laik jalan (%)	85, 44 %	TW I : 23, 60 %	85, 76 %	TW I : 36, 44 %								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	unit	24 0	TW I : 60	24 0	TW I : 60	KASI. REKAYASA LALU LINTAS, FASILITAS KESELAMATAN JALAN & PENERANGAN JALAN UMUM	
				TW II : 47, 20 %		TW II : 47, 20 %												TW II : 60		TW II : 60		
				TW III : 70, 8		TW III : 71, 93												TW III : 60		TW III : 60		
				TW IV : 85, 44		TW IV : 85, 76 %												TW IV : 60		TW IV : 60		

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Perseentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji	0,27	TW I: 0,27	0	TW I: 0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal	orang	227251	TW I: 56813	233076	TW I: 56813	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Persentase capaian bangunan terminal	%	73,32	TW I: 73,32	73,32	TW I: 73,32	KASI. TERMINAL & PERPAR KIRAN		
				TW II: 0,27		TW II:					TW II: 113626		TW II: 113626					TW II: 73,32		TW II: 73,32			
				TW III: 0,27		TW III:					TW III: 170439		TW III: 170439					TW III: 73,32		TW III: 73,32			
				TW IV: 0,27		TW IV:					TW IV: 227251		TW IV: 233076					TW IV: 73,32		TW IV: 73,32			
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	unit	3	TW I: 3	3	TW I: 3	KASI. TERMINAL & PERPAR KIRAN		
																		TW II: 3		TW II: 3			
																		TW III: 3		TW III: 3			

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		TW IV : 3		TW IV : 3		
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / perusahaan	titik	15	TW I : 15	15	TW I : 15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kotaka	Jumlah pengawasan titik parkir	kali	250	TW I : 62	250	TW I : 62		
												TW II : 15	TW II : 15					TW II : 63		TW II : 63		KASI. TERMINAL & PERPAR KIRAN
												TW III : 15	TW III : 15					TW III : 63		TW III : 60		
												TW IV : 15	TW IV : 15					TW IV : 63		TW IV : 63		
							Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan	unit	2700	TW I : 783	2710	TW I : 1121	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji KIR angkutan wajib uji	kali	2273	TW I : 1112	2273	TW I : 1121		KASI. PENGAWASAN LALU LINTAS &

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket				
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
											TW II : 1566		TW II : 1691					TW II : 2224		TW II : 1691	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
											TW III : 2349		TW III : 2273					TW III : 2273		TW III : 2273				
											TW IV : 2700		TW IV : 2710					TW IV : 2273		TW IV : 2273				
								Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	unit	2700	TW I : 783	2710	TW I : 1121	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat PKB yang dipelihara	unit	11	TW I : 11	11	TW I : 11			KASI. PENGAWASAN LALU LINTAS & PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
											TW II : 1566		TW II : 1691					TW II : 11		TW II : 11				
											TW III : 2349		TW III : 2273					TW III : 11		TW III : 11				
											TW IV : 2700		TW IV : 2710					TW IV : 11		TW IV : 11				

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan	rekomendasi	22	TW I : 5	22	TW I : 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender	kali	4	TW I : 1	4	TW I : 1	Kasi. Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas	
											TW II : 10		TW II : 10					TW II : 1		TW II : 1		
											TW III : 16		TW III : 16					TW III : 1		TW III : 1		
											TW IV : 22		TW IV : 22					TW IV : 1		TW IV : 11		
														Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	kali	18	TW I : 4	18	TW I : 4	KASI. REKAYASA LALU LINTAS, FASILITAS	
																		TW II : 4		TW II : 4	KESELAMATAN JALAN & PENERANGAN JALAN UMUM	
																		TW III : 5		TW III : 5		

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		TW IV: 5		TW IV: 5		
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang (L/P) yang berangkat angkutan umum yang diusahakan oleh pemda	orang	391 600	TW I: 979 00	391 820	TW I: 979 00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	unit	27	TW I: 27	27	TW I: 27	Kasi. Angkutan	
											TW II: 195 800		TW II: 195 800					TW II: 27		TW II: 27		
											TW III: 293 700		TW III: 293 700					TW III: 27		TW III: 27		
											TW IV: 391 600		TW IV: 391 820					TW IV: 27		TW IV: 27		
															Jumlah angkutan yang disediakan	unit	2	TW I: 2		TW I: 2		

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		TW II : 2		TW II : 1		
																		TW III :		TW III : 1		
																		TW IV :		TW IV :		
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio izin trayek	%	0,01	TW I : 0,01;	0,01	TW I : 0,01;	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	kali	24	TW I : 6	24	TW I : 6	KASI ANGKUTAN	
												TW II : 0,01;	TW II : 0,01;					TW II : 6		TW II : 6		
												TW III : 0,01;	TW III : 0,01;					TW III : 6		TW III : 6		
												TW IV : 0,01;	TW IV : 0,01;					TW IV : 6		TW IV : 6		

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)	REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)	REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persepsi Kapal yang laik berlayar di laut	26,33 %	TW I : 8%	26,33 %	TW I : 7,94%																Kepala Bidang Pelayaran	
							Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kapal yang laik beroperasi di laut	unit	252	TW I : 75	252	TW I : 75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kapal yang difasilitasi pengurusan izin	unit	252	TW I : 75,6	252	TW I : 75,6		KASI. KEPALA BUHANA N	

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				TW III : 24 %		TW III : 24 %					TW II : 75		TW II : 75		Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata	kali	24	TW II : 75 ;6	24	TW II : 75 ;6		
				TW IV: 26, 33 %		TW IV: 26, 33 %					TW III : 75		TW III : 75					TW III : 75 ;6		TW III : 75 ;6		
		Perse ntase Kapal yang laik berla yar di dana u	94, 52 %	TW I : 23, 29 %	94, 52 %	TW I : 23, 29 %					TW IV: 27		TW IV: 27					TW IV: 27 ;6		TW IV: 27 ;6		

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)	REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)	REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	Penanggung jawab	Ket					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				TW II : 46,58 %		TW II : 46,58 %	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kapal yang laik beroperasi di danau	unit	138	TW I : 34	138	TW I : 34	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	kegiatan	24	TW I : 6	24	TW I : 6	KASI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT & ANGKUTAN SUNGAI DANAU & PENYEBERANGAN		
			TW III : 69,86 %		TW III : 69,86 %						TW II : 68		TW II : 68					TW II : 6		TW II : 6			
			TW IV : 94,52 %		TW IV : 94,52 %						TW III : 102		TW III : 102					TW III : 6		TW III : 6			
											TW IV : 138		TW IV : 138					TW IV : 6		TW IV : 6			

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/Kg)	org/kg	116 000	TW I : 290 00	117 230	TW I : 290 00	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara	unit	3	TW I : 3	3	TW I : 3	KASI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT & ANGKUTAN SUNGAI DANAU & PENYEBERANGAN		
											TW II : 580 00		TW II : 580 00					TW II : 3		TW II : 3			
											TW III : 870 00		TW III : 870 00						TW III : 3			TW III : 3	
											TW IV : 116 000		TW IV : 117 230						TW IV : 3			TW IV : 3	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perse ntase pengu njang urusan peran gkat daerah berjal an sesuai standar	100 %	TW I : 100	100 %	TW I : 100															SEKRET ARIS		

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket				
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						TW II : 100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	100	TW I : 30	100	TW I : 30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	2	TW I : 1	2	TW I : 1	Kasubag Perencanaan & Keuangan			
						TW III : 100						TW II : 17	TW II : 17					TW II : 1		TW II : 1				
						TW IV : 100						TW III : 30	TW III : 30					TW III : 1		TW III : 1				
												TW IV : 23	TW IV : 23					TW IV : 1		TW IV : 1				
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	dokumen	2	TW I : 1	1	TW I : 1	Kasubag Perencanaan & Keuangan			
																		TW II : 1		TW II : 1				
																		TW III : 1		TW III : 1				
																		TW IV : 1		TW IV : 1				

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		: 1		:		
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	2	TW I : 1	2	TW I : 1	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
																		TW II :		TW II :		
																		TW III :		TW III :		
																		TW IV : 1		TW IV : 1		
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	dokumen	10	TW I : 4	10	TW I : 4	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
																		TW II : 2		TW II : 2		
																		TW III : 2		TW III : 2		
																		TW IV : 2		TW IV : 2		

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket				
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
							Adminis trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen tase administrasi keuangan yang tersele nggara dengan baik	%	95	TW I : 20	95	TW I : 20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjagannya terbayarkan	oran g	27	TW I : 27	27	TW I : 27	Kasubag Perencanaan & Keuangan			
											TW II : 20		TW II : 20					TW II : 27		TW II : 27				
											TW III : 20		TW III : 20					TW III : 27		TW III : 27				
											TW IV : 35		TW IV : 35					TW IV : 27		TW IV : 27				
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestera n SKPD yang disusun Tepat Waktu	doku men	18	TW I : 4	18	TW I : 4	Kasubag Perencanaan & Keuangan			
																		TW II : 4		TW II : 4				

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		TW III : 4		TW III : 4		
																		TW IV : 6		TW IV : 6		
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadminstrasika n sesuai standar	%	100	TW I : 25	100	TW I : 25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	dokumen	4	TW I : 1	4	TW I : 1	Kasubag Umum & Kepegawaian	
											TW II : 25		TW II : 25					TW II : 1		TW II : 1		
											TW III : 25		TW III : 25					TW III : 1		TW III : 1		
											TW IV : 25		TW IV : 25					TW IV : 1		TW IV : 1		
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	%	95	TW I : 20	100	TW I : 20	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	dokumen	4	TW I : 1	4	TW I : 1	Kasubag Perencanaan & Keuangan	

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
											TW II : 25		TW II : 25					TW II : 1		TW II : 1		
											TW III : 25		TW III : 25					TW III : 1		TW III : 1		
											TW IV : 25		TW IV : 25					TW IV : 1		TW IV : 1		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	95	TW I : 20	95	TW I : 20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	dokumen	12	TW I : 3	12	TW I : 3	Kasubag Umum & Kepegawaian	
											TW II : 25		TW II : 25					TW II : 3		TW II : 3		
											TW III : 25		TW III : 25					TW III : 3		TW III : 3		
											TW IV : 25		TW IV : 25					TW IV : 3		TW IV : 3		

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket				
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	TW I : 5	5	TW I : 5	Kasubag Umum & Kepegawaian			
																	TW II : 1		TW II : 1					
																		TW III : 2		TW III : 2				
																		TW IV : 2		TW IV : 2				
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	%	95	TW I : 20	95	TW I : 20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	5	TW I : 5	5	TW I : 5	Kasubag Umum & Kepegawaian			
																		TW II : 5		TW II : 5				
																		TW III : 5		TW III : 5				

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
											TW IV : 25		TW IV : 25										
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis	8	TW I : 8	8	TW I : 8	Kasubag Umum & Kepegawaian		
																		TW II : 8		TW II : 8			
																			TW III : 8			TW III : 8	
																			TW IV : 8			TW IV : 8	
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	TW I : 2	2	TW I : 2	Kasubag Umum & Kepegawaian		
																			TW II : 2			TW II : 2	
																			TW III : 2			TW III : 2	
																			TW IV : 2			TW IV : 2	

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)	REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	jenis	3	T W I : 3	3	T W I : 3	Kasubag Umum & Kepegawaian		
																	T W II : 3		T W II : 3				
																	T W III : 3		T W III : 3				
																	T W IV : 3		T W IV : 3				
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksampler	72	T W I : 18	72	T W I : 18	Kasubag Umum & Kepegawaian		
																	T W II : 18		T W II : 18				
																	T W III : 18		T W III : 18				
																	T W IV :		T W IV :				

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		18		18		
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	30	TW I : 7	30	TW I : 7	Kasubag Umum & Kepegawain	
																		TW II : 8		TW II : 8		
																		TW III : 8		TW III : 8		
																		TW IV : 7		TW IV : 7		
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	kali	150	TW I : 35	150	TW I : 35	Kasubag Umum & Kepegawain	
																		TW II : 40		TW II : 40		
																		TW III : 40		TW III : 40		

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		TW IV : 35		TW IV : 35		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	95	TW I : 95	95	TW I : 95	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	40	TW I : 28	40	TW I : 28	Kasubag Umum & Kepegawaian	
											TW II :		TW II :					TW II :		TW II :		
											TW III :		TW III :					TW III :		TW III :		
											TW IV :		TW IV :					TW IV : 12		TW IV : 12		
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	8	TW I : 7	8	TW I : 2	Kasubag Umum & Kepegawaian	
																		TW II :		TW II : 5		
																		TW III :		TW III :		

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
																		TW IV : 1		TW IV : 1			
														Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	2	TW I : 1	2	TW I : 1			
																		TW II : 1		TW II : 1		Kasubag Umum & Kepegawaian	
																		TW III : 1		TW III : 1			
																		TW IV : 1		TW IV : 1			
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	95	TW I : 20	95	TW I : 20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	surat	1.200	TW I : 300	1.200	TW I : 300			Kasubag Umum & Kepegawaian
																		TW II : 300		TW II : 300			

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
											TW III : 25		TW III : 25					TW III : 300		TW III : 300			
											TW IV : 25		TW IV : 25					TW IV : 300		TW IV : 300			
														Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	rekening	24	TW I : 6	24	TW I : 6	Kasubag Umum & Kepegawaian		
																		TW II : 6		TW II : 6			
																			TW III : 6			TW III : 6	
																			TW IV : 6			TW IV : 6	
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	orang	4	TW I : 4	4	TW I : 4	Kasubag Umum & Kepegawaian		
																			TW II : 4			TW II : 4	

No	Program						Kegiatan							Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		TW III : 4		TW III : 4		
																		TW IV : 4		TW IV : 4		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara dengan baik	%	95	TW I : 20	95	TW I : 20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	unit	1	TW I : 1	1	TW I : 1		Kasubag Umum & Kepegawaian
											TW II : 25		TW II : 25					TW II : 1		TW II : 1		
											TW III : 25		TW III : 25					TW III : 1		TW III : 1		
											TW IV : 25		TW IV : 25					TW IV : 1		TW IV : 1		

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan					Penanggung jawab	Ket			
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)			REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	11	T W I : 11	11	T W I : 11	Kasubag Umum & Kepegawain	
																		T W II : 11	T W II : 11			
																		T W III : 11	T W III : 11			
																		T W IV : 11	T W IV : 11			
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	38	T W I : 9	38	T W I : 9	Kasubag Umum & Kepegawain	
																		T W II : 10	T W II : 10			
																		T W III :	T W III :			

No	Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Penanggung jawab	Ket		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)		REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)		Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				REALISASI TARGET KINERJA (TRIWULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																		10		10		
																		TWIV:9		TWIV:9		
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	TW I:2	2	TW I:2		
																		TW II:2		TW II:2	Kasubag Umum & Kepegawaian	
																		TW III:2		TW III:2		
																		TW IV:2		TW IV:2		

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2024. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 125,16 %.

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi akuntabilitas keuangan mencapai 92,65%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.

2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

2. SARAN

Walaupun demikian dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dan pengembangan pembangunan diperlukan adanya peran serta dari pihak terkait, baik instansi pemerintah, maupun badan usaha yang terlibat dalam bidang perhubungan. Dengan adanya dukungan dan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan program – program Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

Mallu, 15 Januari 2025
KEPALA DINAS,

A. R. SALIM, S.Sos, MM
NIP. 196511051987031015